

Media Online dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum (Pemilu)

Arpandi

Redaktur Media Online Brito.id, Jambi, Indonesia

Email : arfandaisarbaini952@gmail.com

Abstrak

Media *online* telah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik masyarakat. Artikel ini berupaya mempertajam peran media online dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Artikel ini menggunakan studi literatur review, memanfaatkan bahan pustaka yang relevan sebagai data primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa media online dengan berbagai fungsi yang dimilikinya telah terlibat dan berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu; eksekutif maupun legislatif. Beberapa fungsi yang kuat digunakan dalam peningkatan kesadaran masyarakat ialah informasi, komunikasi dan pendidikan. Selain informasi dan pendidikan yang menjadi sumber pengetahuan warga negara dalam memperoleh pendidikan politik dan Pemilu, lembaga penyelenggara memanfaatkan media tersebut untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Memberikan ruang pelayanan publik di website yang secara perlahan akan membentuk keyakinan dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu.

Kata kunci: Media Online, Partisipasi Politik, Pemilihan Umum.

Internet Media's Role in Boosting General Election Participation from the Community (Elections)

Abstract

Political involvement, political awareness, and political education have all been made possible in part by online media. This essay aims to clarify how internet media might boost citizens' political engagement in general elections (elections). This paper conducts a literature review and uses primary and secondary data from pertinent publications. This study discovered that, due to the many functions of internet media, people's political engagement in legislative and executive elections has increased. Information, communication, and education are three key strategies for raising public awareness. Implementing agencies employ the media to communicate with the general public in addition to information and education, which are sources of knowledge for individuals to gain political and election education. By giving public services space on the website, election organizers will gradually gain the people's trust.

Keywords: *Online Media, Political Participation, General Elections.*

PENDAHULUAN

Digitalisasi di era modern telah memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang informasi dan kegiatan sosial maupun politik saat ini. Penggunaan media *online* yang terkonsentrasi telah berkontribusi pada faktor yang

mencengangkan di kalangan pemilih di mana media digital telah mengubah preferensi masyarakat terhadap hak untuk memilih dalam Pemilu.

Media *online* telah mengubah tingkat partisipasi pemilih dan publik. Masyarakat menggunakan internet dalam jumlah yang tinggi, sehingga penggunaan internet sebagai media dapat mempengaruhi partisipasi dalam proses politik. Situasi di Indonesia, pemuda maupun masyarakat umum di kota serta desa banyak berpartisipasi dalam kegiatan politik. Internet menjadi bagian terpenting dari partisipasi politik. Media *online* memiliki banyak efek positif dan mudah untuk menyebarkan informasi atau pengetahuan kepada orang lain. Seperti di Indonesia, penggunaan media *online* sangat intens dalam aktivitas privat maupun keterlibatan politik (Saud & Mashud, 2020).

Orang memilih untuk berpartisipasi dalam politik karena berbagai alasan. Ini adalah cara terbaik bagi warga negara untuk terlibat dalam partisipasi politik dalam rangka membuat perubahan signifikan bagi kehidupan masyarakat. Semakin banyak orang terlibat dalam politik di tingkat nasional, mereka mungkin lebih memahami situasi politik negara, dan dapat mengontrol kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, warga negara dapat berupaya menemukan solusi untuk masalah rakyat jika mereka dapat memahami politik.

Namun, jika warga negara khususnya memiliki pemahaman politik, kemudian mereka dapat menjadi bagian dari tindakan politik atau kegiatan demokrasi, maka pemerintah dapat mewujudkan tingkat kepuasan masyarakat di kalangan warga negara. Partisipasi politik di negara mana pun akan mengarah pada penguatan sistem politik. Jika setiap warga negara dapat berpartisipasi, maka akan menjadi sangat sulit bagi pemerintah mana pun untuk mengabaikan masalah mereka. Dengan demikian, peningkatan keterlibatan dalam kegiatan politik harus memahami masalah sosial politik (Saud, 2020).

Di beberapa negara disebutkan bahwa partisipasi politik pemuda cenderung menurun, dan media kemudian dianggap sebagai salah satu penyebab penurunan tersebut. Hal ini sangat didukung oleh perspektif media. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kontradiksi terhadap pandangan-pandangan tersebut yang melahirkan perspektif mobilisasi. Ada pula pihak yang menilai bahwa media memiliki manfaat dalam meningkatkan partisipasi politik. Dalam hal ini, komunikasi berperan penting sebagai alat analisis untuk mengetahui pengaruh konsumsi berita politik online terhadap partisipasi politik (Effendi, *et.al.*, 2020).

Budaya politik sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi di kalangan masyarakat. Karena, adanya budaya politik dapat meningkatkan demokrasi dan partisipasi politik yang bermartabat. Tapi pada kenyataannya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dari praktek politik dan demokrasi yang terjadi di Indonesia seperti halnya masih adanya politik uang pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) dan tidak adanya kebebasan berpendapat serta berekspresi dalam berpolitik dan lain sebagainya. Politik uang dapat mempengaruhi pembangunan politik. Praktik politik harus sesuai dengan politik pembangunan sebagai gerakan perubahan menuju sistem politik idealis yang dikembangkan oleh suatu pemerintahan negara, selain itu pembangunan politik memerlukan proses politik yang jujur dalam praktik politik, proses yang mengikutinya meliputi banyaknya orang yang berpartisipasi dalam politik. dan proses persaingan yang sehat dalam politik (Nurjulaiha, *et.al.*, 2022).

Studi Anderson, dan Kuswanto menyimpulkan bahwa media massa dan media *online* tidak berpengaruh langsung terhadap partisipasi politik. Partisipasi politik secara langsung

dipengaruhi oleh variabel kesadaran politik dan sosialisasi politik. Oleh karena itu, disarankan agar penggunaan media massa serta media *online* dalam Pemilu di Provinsi Jambi perlu ditingkatkan, terutama informasi yang berkaitan dengan hak politik masyarakat (Anderson & Kuswanto, 2021).

Oleh karena itu, studi ini akan menyoroti bagaimana keterlibatan media online dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu. Media online menjadi tawaran penyebaran informasi di era digital yang mampu melampaui batas-batas kultural, teritorial, dan menjangkau seluruh masyarakat digital. Hal ini yang mendorong penelitian ini relevan untuk dilakukan di masa-masa politik.

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan *literature review*. Pendekatan ini berupaya melacak bagaimana perkembangan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum. Serta melihat perkembangan dunia digital dan teknologi informasi saat ini, semakin relevan untuk menyoroti dan mempertajam bagaimana media online berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam masa-masa politik terkhusus pemilihan umum, eksekutif maupun legislatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber pustaka yang relevan terkait tiga tema; media *online*, partisipasi masyarakat dan pemilihan umum (Assingkily, 2021). Dengan demikian, meninjau beberapa literatur akan dapat memberikan gambaran dan kesimpulan bahwa media *online* sebagai *new media* ikut terlibat, berpartisipasi, serta berperan dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dengan partisipasi politik masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media Online Multifungsi dalam Pemilihan Umum

Media digital adalah konten digital yang dapat ditransmisikan melalui internet atau jaringan komputer. Ini dapat mencakup teks, audio, video, dan grafik. Artinya, berita dari jaringan TV, surat kabar, majalah, dll. yang disajikan di situs web atau blog dapat masuk dalam kategori ini. Sebagian besar media digital didasarkan pada penerjemahan data analog menjadi data digital. Internet mulai berkembang ketika teks dimasukkan ke Internet alih-alih disimpan di atas kertas seperti sebelumnya. Segera setelah teks dimasukkan ke dalam komputer, gambar menyusul, lalu datangnya audio dan video ke Internet. Media digital telah berkembang pesat dalam beberapa tahun yang singkat menjadi seperti yang kita kenal sekarang dan terus berkembang.

Media *online* adalah segala bentuk media yang dapat diakses dan dikonsumsi melalui internet. Media *online* dapat berupa teks, gambar, video, atau suara, dan dapat diakses melalui berbagai platform seperti *website*, news, aplikasi, dan sosial media. Beberapa contoh media online adalah (1) *Website* berita: website yang menyajikan berita dari berbagai sumber; (2) *Platform* video: seperti YouTube atau TikTok, yang menyediakan video dari berbagai kreator atau pengguna; (3) Sosial media: seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau LinkedIn, yang memungkinkan pengguna untuk berbagi konten seperti foto, video, status, dan artikel; (4) *Podcast*: media audio berupa wawancara, cerita, atau diskusi yang dapat diunduh dan didengarkan melalui internet; dan (5) *Ebook*: buku yang dapat dibaca secara digital dan diunduh melalui internet.

Media *online* memungkinkan akses informasi dan hiburan tanpa batas waktu dan tempat, serta memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam konten yang dibagikan. Hal ini membuat media online menjadi salah satu sumber informasi dan hiburan yang populer di era digital saat ini.

Sifat tekstual tak terlihat yang mendasari media digital berasal dari fakta bahwa konten, antarmuka, dan beberapa bagian dari arsitektur fungsional harus diwujudkan dan diproses dalam alfabet biner, dan diproses sebagai urutan bit yang dapat diedit. Alfabet biner adalah alfabet universal pertama untuk mewakili segala sesuatu yang dapat diwakili. Hal ini dapat dianggap sebagai tekstualisasi urutan kedua dan ini adalah dasar dan batas fleksibilitas dan kelenturan media digital (Finnemann, 2011).

Ada beberapa alasan yang menjadikan media menjadi sangat penting dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan fungsi media sangat luas, akan disajikan dalam tabel berikut (Musfialdy, 2015).

Tabel 1. Fungsi Media

Individu	Penganugerahan status (pencitraan) seseorang sering menjadikan media massa maupun media sosial sedia alat untuk menganugerahan status (pencitraan) guna kepentingan politik, ekonomi, sosial dan agama mereka, menambah prestise, peringatan, dan instrumenta,
	Masyarakat media berfungsi sebagai, peringatan, Instrumental, dan etisisasi,
Kelompok/organisasi	Deteksi: Pengetahuan tentang perilaku yang menyimpang dan subversif, mengatur opini publik, memonitor, mengontrol, mengesahkan kekuatan, penganugerahan status.
	mempromosikan, pendidikan, hiburan, propaganda, sosial atau kemanusiaan dan fungsi pengawasan atau fungsi kontrol.
Budaya	meningkatkan kontak antar budaya, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan budaya tersebut
<i>Medium is the message</i>	pemahaman bahwa media merupakan pembentuk kebudayaan. Pentuk pengaruh media dalam kebudayaan yakni pembentukan nilai dan pola pemikiran manusia
Teknologi	kekuatan dominan, pada dasarnya sisitem sosial dan sistem ekonomi mempromosikan tenologi dan mendominasi kebudayaan
	Media massa mendorong kebudayaan dalam ekonomi dalam segmentasi informasi. Segmentasi ini merupakan penajaman segmen komsumen yang mengkonsusmsi media atau industri media yang ada

Untuk mulai dengan media yang diselidiki melayani fungsi pada tingkat masyarakat. Mereka menyebarkan nilai atau mereka membangun realitas sosial. Untuk sebagian besar, menyampaikan nilai-nilai yang berbeda tergantung pada pendapat politik yang berbeda

atau tingkat kekesalan. Perbedaan seperti itu terutama ada di dalam media, misalnya antara saluran TV yang berbeda atau antara surat kabar yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini dapat dikendalikan dengan memilih media yang memiliki opini politik yang sama dan tingkat kecanggihan yang sama.

Sebagai fungsi *pertama*, membaca atau menonton item berita yang khas dipilih. Media nasional atau lokal yang tersedia dengan opini politik rata-rata dan tingkat kecanggihan menyajikan item berita tertentu akan diselidiki. Fungsi *kedua* yang dipilih adalah membaca atau menonton berita harian secara keseluruhan, karena 'up-to-date' dianggap penting bagi banyak orang. Menonton berita harian secara keseluruhan di siaran berita utama TV pada malam hari dibandingkan dengan membaca koran online dan koran cetak. Media yang tersedia secara nasional dengan berbagai tingkat kecanggihan diperhitungkan – setidaknya untuk surat kabar cetak, karena ukurannya sangat bervariasi. Untuk surat kabar online perbedaan seperti itu tidak mungkin karena perkiraan hanya tersedia untuk jangka waktu rata-rata dengan tetap berada di beranda surat kabar yang berbeda (Hischier & Reichart, 2003).

Media *online* menjadi peta ruang masyarakat baru. Teknologi multimedia memungkinkan untuk membangun model surat kabar sebagai struktur multi-level yang kompleks. Itu diakibatkan karena kehadirannya di berbagai situs internet, jejaring sosial, dan pada saat yang sama dijejarkan. Jaringanisasi adalah seperangkat rute untuk perilaku pembaca yang memilih tingkat pembacaan teks.

Teks media dibuat seterbuka mungkin, dialog diubah menjadi interaktivitas, polifoni ditingkatkan dengan multimedia dan hipertekstualitas. Hasilnya adalah peningkatan peran penerima pesan baik dalam menciptakan citra media maupun dalam mengkonstruksi realitas (media). Selain itu, saat ini penerima dan penerima terus berpindah tempat. Konsumen (tidak lagi hanya audiens), menjadi peserta aktif dalam komunikasi media (memilih konten, mengatur, berlangganan atau berhenti berlangganan, berkomentar), mengembangkan teks yang berubah menjadi alat yang efektif untuk mengatur masyarakat (Barashkina et al, 2019).

Media *online* dapat digunakan dalam pemilihan umum setidaknya memuat beberapa fungsi berikut: *pertama*, informasi: Media *online* dapat digunakan sebagai sumber informasi yang cepat, mudah diakses, dan terupdate. Berita, artikel, video, dan podcast dapat disajikan dalam berbagai topik seperti politik, ekonomi, teknologi, kesehatan, dan banyak lagi. *Kedua*, komunikasi, media *online* memungkinkan komunikasi dua arah antara pembaca dan penulis atau antara pengguna dengan pengguna lainnya. Pengguna dapat mengomentari, berbagi, atau membalas artikel atau konten lainnya. Selain itu, media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berbagi informasi dengan orang lain.

Ketiga, pendidikan, media *online* dapat digunakan sebagai alat pembelajaran. Ada banyak platform edukatif yang tersedia seperti Coursera, edX, dan Khan Academy yang menawarkan kursus online dalam berbagai subjek. Selain itu, banyak situs web juga menyediakan materi pembelajaran gratis seperti buku, makalah, dan video. Dalam pemilihan umum media baik media massa, media elektronik, media online atau digital dapat berfungsi dalam mengawal pelaksanaan pemilu. Hal ini dapat diuraikan dari beberapa fungsi di atas. Sebagai informasi, pemilihan umum jelas menyebarkan informasi

melalui media online. Sejak 2014 setidaknya pelaksanaan Pemilu di Indonesia telah memanfaatkan media digital sebagai lumbung penyebaran informasi kepada publik.

Fungsi komunikasi dimanfaatkan untuk menyukseskan berbagai rangkaian kegiatan pemilihan umum. Media *online* menjadi tempat publik bertemu, dan penyelenggara menyebarkan informasi yang menjadi ruang interaksi antar masyarakat umum dengan pihak yang berwenang atau pelaksana Pemilu. *Website* resmi penyelenggara Pemilu yang terbuka lebar untuk diakses bagi masyarakat luas menjadi alasan kuat bahwa media online turut berkontribusi menyampaikan pesan-pesan, informasi, atau berbagai kegiatan Pemilu.

Sedangkan fungsi pendidikan, media *online* yang terjangkau luas oleh masyarakat menjadi ruang untuk memperoleh informasi secara akurat dan akuntabel. Tentu tanpa kemampuan penyelenggara Pemilu memberikan informasi yang valid sulit untuk mengakui masyarakat akan percaya kepada penyelenggara Pemilu. Artinya Pemilu diselenggarakan dengan jujur, terbuka, dan akuntabel dapat dilihat dalam informasi atau pesan yang ditampilkan di media *online*. Dalam konteks ini penyelenggara Pemilu memanfaatkan media *online* untuk melakukan pendidikan politik dan kepemiluan melalui jejeraing digital yang dimiliki.

Pengetahuan politik adalah metrik yang menilai kemampuan warga negara untuk menjawab serangkaian pertanyaan dengan benar. Ini sebagian didasarkan pada akses ke pengetahuan tentang keputusan pemerintah, penugasan politik, dan mengacu pada informasi spesifik serta keterampilan sipil dan politik dan pemahaman global, nasional, dan regional. Pengetahuan politik menghasilkan orang-orang yang sadar politik, waspada, pandai bersuara, dan cakap yang dapat menilai tindakan dan kepentingan mereka untuk membela mereka dalam berpartisipasi politik (Intyaswati et al, 2021).

Salah satu permasalahan fundamental dalam Pemilu di era kontemporer yaitu pergeseran dari permasalahan teknis dalam penyelenggaraan hingga tingkatan akurasi yang dihasilkan dari Pemilu sebagai perwujudan demokrasi substansial. Praktek Pemilu yang hanya menunjuk dua elemen Pemilu seremonial sebagai pelaksanaan demokrasi prosedural, yaitu proses memilih dan penghitungan suara, menjadi tidak relevan lagi seiring dengan berkembangnya teknologi informasi (Zuhri, 2020). Dalam konteks ini, meskipun perubahan sistem Pemilu menjadi penting, tetapi tanpa mempertimbangkan kualitas hasil yang terukur, akan berdampak buruk bagi kepercayaan publik.

Keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu perlu menjadi perhatian serius oleh setiap penyelenggara. Sehingga memberikan kepercayaan kepada masyarakat terutama pemilih. Baik dari aspek transparansi, partisipasi dan efisiensi. Masyarakat menilai informasi dapat disampaikan melalui *offline* maupun *online*. Media online dapat diakses terbuka yang menjadikan KPU tetap terjaga dari berbagai pelanggaran. Sehingga informasi secara *online* tersebut tersebar luas yang tidak memungkinkan untuk ditutup. Keterbukaan informasi Pemilu pun dapat dilihat bagaimana proses Pemilu ditampilkan di ruang publik terbuka, yaitu media *online*.

Pemanfaatan media *online* dan media sosial oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai wujud partisipasi politik dapat dimaksimalkan KPU melalui berbagai *platform* digital, media online, media social, dan lain sebagainya akan memunculkan eksistensi dan keseriusan mereka dalam mengoptimalkan media untuk literasi politik maupun partisipasi masyarakat guna mengahadapi Pemilu 2024 mendatang. Dengan demikian KPU melalui pemanfaatan web serta media digital yang berkembang saat ini serta aplikasi dapat

memudahkan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Media Online dan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu

Bagaimana media online ikut berperan terhadap partisipasi politik masyarakat dan bagaimana pula media terus berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi publik. Hal ini tidak lain merupakan tujuan utama dalam agenda besa Pemilihan Umum (Pemilu). Oleh karena itu Pemilu menjadi catatan dan poin dasar bagaimana keterlibatan masyarakat dalam Pemilu ikut menaikkan angka atau kualitas demokrasi di Indonesia.

Partisipasi politik adalah keterlibatan seseorang dalam proses politik atau aktivitas yang terkait dengan pemerintahan. Partisipasi politik dapat dilakukan oleh individu atau kelompok, dan meliputi berbagai tindakan seperti memilih, memberikan sumbangan, menghadiri pertemuan politik, atau melakukan aksi.

Beberapa bentuk partisipasi politik yang umum dijumpai adalah *pertama*, pemilihan, memilih dalam pemilu atau referendum adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang paling umum. Memilih adalah hak dan kewajiban warga negara dalam sebuah demokrasi, dan merupakan cara yang efektif untuk memberikan suara dalam proses politik. *Kedua*, aktivisme, yaitu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mempromosikan perubahan sosial atau politik. Contoh aktivisme politik adalah demonstrasi, aksi protes, kampanye, dan petisi.

Ketiga, kontribusi keuangan, yakni memberikan sumbangan keuangan kepada partai politik, kampanye politik, atau organisasi politik adalah bentuk partisipasi politik lainnya. Sumbangan keuangan dapat digunakan untuk membiayai kampanye politik dan membantu partai atau organisasi mencapai tujuannya. *Keempat*, mempengaruhi kebijakan, yakni bentuk partisipasi politik juga dapat dilakukan melalui pengaruh pada kebijakan publik. Cara-cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengirim surat kepada pejabat pemerintahan, menghadiri pertemuan publik, atau bergabung dengan kelompok advokasi yang memiliki kepentingan serupa.

Kelima, pendidikan politik sebagai bentuk partisipasi politik. Dengan mempelajari isu politik dan proses politik, individu dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang peran mereka dalam proses politik dan dapat membuat keputusan yang lebih informasi dalam partisipasi politik mereka.

Relasi antara penggunaan media dan pengetahuan politik memiliki rekam jejak yang terbukti. Informasi yang dihasilkan media dan bagaimana pengguna menerima berita menentukan pengetahuan politik yang diperoleh. Itu terjadi dengan menghadirkan cukup banyak berita tentang isu dan politik terkini, mendorong pengguna untuk memberi sinyal yang terkait dengan politik. Pencarian aktif adalah langkah pertama untuk membaca berita dan didorong oleh pengawasan untuk mengumpulkan lingkungan pengguna pengetahuan (Intyaswati, *et.al.*, 2021).

Penting memperhatikan konsekuensi sosial daripada politik dari kebangkitan masyarakat yang sadar akan pengetahuan politik; khususnya, kapasitas internet untuk memperkuat partisipasi demokratis dan keterlibatan sipil yang menghubungkan warga negara dan pemerintah. Pengaruh utama perkembangan ini, seperti yang diteorikan dalam model pasar, akan ditentukan oleh "penawaran" dan "permintaan" informasi dan komunikasi elektronik tentang pemerintahan, penyelenggara Pemilu dan politik.

Permintaan, pada gilirannya, diasumsikan sangat bergantung pada karakteristik sosial pengguna internet dan orientasi politik mereka sebelumnya (Norris, 2007).

Partisipasi dalam Pemilu adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang paling umum dan penting dalam demokrasi. Memilih dalam Pemilu memungkinkan warga negara untuk memilih pemimpin eksekutif atau legislatif yaitu wakil rakyat dan mempengaruhi keputusan politik di negara.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dalam Pemilu: *pertama*, mendaftar untuk memilih, untuk memilih dalam Pemilu, seseorang harus terdaftar sebagai pemilih terlebih dahulu. Prosedur pendaftaran bisa berbeda-beda di setiap negara, namun biasanya dapat dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum atau *online* melalui situs web resmi.

Kedua, memahami calon dan isu-isu. Penting untuk mempelajari calon-calon dan isu-isu yang terkait dalam Pemilu. Ini memungkinkan pemilih untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Informasi mengenai calon-calon dapat ditemukan di situs web resmi partai politik, media massa, atau situs web berita.

Ketiga, berpartisipasi dalam debat dan forum: Debat dan forum pemilihan dapat memberikan kesempatan bagi pemilih untuk bertemu dengan calon-calon dan mempertanyakan pandangan mereka mengenai isu-isu yang penting. Kehadiran dalam acara seperti ini memungkinkan pemilih untuk membuat keputusan yang lebih informasi dan berdasarkan pemahaman yang lebih baik.

Keempat, mencoblos pada hari pemilihan: Mencoblos pada hari pemilihan adalah cara paling langsung untuk mempengaruhi hasil Pemilu. Penting untuk memastikan bahwa pemilih telah mendaftar sebagai pemilih dan mengetahui tempat pemungutan suara. *Kelima*, mendorong partisipasi pemilih: Selain partisipasi individu, mendorong partisipasi pemilih adalah cara lain untuk meningkatkan partisipasi dalam Pemilu. Ini bisa dilakukan dengan cara mengajak teman-teman untuk memilih, membagikan informasi mengenai Pemilu di media sosial, atau mengorganisir kampanye yang mendorong partisipasi pemilih.

Sebagaimana temuan penelitian Joseph menunjukkan bahwa ketika masyarakat memiliki kesempatan untuk belajar bagaimana terlibat dalam aktivitas politik *online*, mereka cenderung melakukannya. Selain itu, karena partisipasi *online* juga mendukung partisipasi *offline*, pendidikan literasi media digital juga dapat mendukung keterlibatan sipil dan politik yang lebih luas. Pemerolehan pendidikan atau pengetahuan sudah menjadi prediktor kuat partisipasi sipil dalam politik (Kahne et al, 2010).

Joseph menyimpulkan bahwa secara kuantitatif frekuensi pendidikan literasi media digital dan hubungannya dengan berbagai bentuk partisipasi sipil dan politik *online*. Beberapa bentuk pendidikan literasi media digital dikaitkan dengan perolehan kuantitas aktivitas *online* yang didorong oleh politik. Dengan demikian ia mempertegas bahwa dukungan dan bimbingan dapat membantu banyak masyarakat dalam memanfaatkan sepenuhnya kemampuan media digital untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik mereka (Kahne et al, 2010).

Saat ini, media *online* maupun media sosial adalah salah satu alat komunikasi massa yang penting dan efektif. Di abad ke-21, teknologi komunikasi canggih telah memadatkan setiap aspek masyarakat. Hari ini, kita tidak bisa membayangkan dunia tanpa media sosial, khususnya di bidang politik. Ini memainkan peran penting dalam partisipasi politik aktif

rakyat. Media bebas sejak lama diakui sebagai landasan demokrasi dan memegang peranan penting berperan dalam mempengaruhi hasil politik selama Pemilu (Hasan, 2005).

Media *online* serta media sosial telah berkembang pesat sebagai wadah aktivisme politik dalam berbagai bentuknya. Platform media online dapat diakses terbuka. Demikian juga media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Youtube memberikan cara baru untuk 'menstimulasi keterlibatan warga negara' dalam kehidupan politik di mana Pemilu dan kampanye Pemilu memiliki peran penting.

Pada tahun-tahun sebelumnya, media tradisional memainkan peran penting dalam menciptakan kesadaran di antara orang-orang tetapi selama periode waktu tertentu, media sosial menjadi alat pemasaran penting yang tidak hanya membuat orang sadar tetapi juga membantu menarik mereka. Politisi menjadi semakin aktif di dalamnya. Komunikasi pribadi melalui media sosial mendekatkan politisi dan partai dengan pemilihnya. Melalui situs jejaring sosial, partai politik dan kandidat dapat berkomunikasi langsung dengan publik dan berinteraksi dengan mereka (Akmal & Salman, 2015).

Sebaliknya, melalui situs jejaring sosial, pemilih juga disediakan wadah untuk berbagi pendapat dan didengar. Warga negara dapat memanfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin. Berbagi komunikasi terkait manifesto partai, pidato politik yang sedang berlangsung, pertukaran video terkait isu politik dan fitnah di antara para politisi dapat menyebabkan diskusi serius di media sosial. Dalam Pemilu partisipasi pemuda menciptakan kesadaran tentang pentingnya memilih dalam demokrasi melalui media *online*, digital atau media elektronik (Narinder & Kaur, 2021).

Media baru tersebut akhirnya dapat secara sekaligus memberikan informasi tertulis seperti dalam koran, bergerak seperti kabar di televisi, serta proses informasi yang dimiliki dengan cepat dapat tersampaikan kepada para penggunanya. Hal itulah yang membuat media baru berjejaringan internet akhirnya banyak dipilih oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas mencari informasi, serta untuk mempermudah, mempercepat, dan memperluas jangkauan komunikasi yang mereka lakukan (Mudjiyanto, 2014).

Penggunaan media baru mempunyai banyak kebaikan, namun medium tersebut juga memiliki kekurangan yang membawa pengaruh yang tidak baik dari sudut budaya dan masyarakat. Oleh itu, kajian ini telah membantu dalam menerangkan fenomena peranan media baru sebagai demokrasi maklumat dan fungsi medium tersebut dalam mempengaruhi partisipasi politik dalam kalangan masyarakat (Akmal & Salman, 2015).

Peran praktik media digital dalam membentuk kembali kampanye pemilu didorong oleh ketegangan antara kontrol dan interaktivitas. Kami membuat sketsa pendekatan konseptual untuk memahami proses ini, yang menurut kami dibentuk oleh interaksi antara organisasi, norma, dan aturan politik elektoral; sikap postmaterial terhadap keterlibatan politik; dan keterjangkauan dan penggunaan media digital. Media digital memupuk budaya eksperimen organisasi dan mentalitas partai sebagai gerakan yang memungkinkan banyak orang menolak norma disiplin hierarkis dan loyalitas partisan yang biasa (Chadwick & Galley, 2016).

Masyarakat sekarang melihat kampanye Pemilu sebagai peluang lain untuk dipersonalisasi dan diperdebatkan ekspresi politik mereka. Karena warga negara yang dimungkinkan secara digital menghembuskan kehidupan baru ke dalam bentuk lama dengan sebagian membuatnya kembali dalam citra partisipatif mereka sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik dapat dijelaskan berdasarkan pendekatan *exchange*, yaitu: kepercayaan, keyakinan, investasi, dan alternatif. Model partisipasi politik yang sesuai dengan kondisi di lapangan adalah model yang menjelaskan bahwa penggunaan media sosial memiliki peranan terhadap partisipasi politik melalui kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu sebagai mediator. Sedangkan trust memiliki peran terhadap partisipasi politik seseorang atau sekelompok (Kuncoro, 2018).

Media sosial dapat dilihat sebagai katalis dalam partisipasi politik dan memperkuat jangkauan KPU untuk menyebarkan informasi tentang Pilpres, dan untuk memaksimalkan jangkauan sasaran ke publik atau sektor swasta. Media sosial digunakan untuk menyampaikan kegiatan seputar Pilpres dan merangsang tumbuhnya opini publik. Media sosial pada masa pemilu dapat dilihat sebagai peran pendukung dalam menyebarkan informasi otonom dari lembaga pemilu seperti KPU, dan Bawaslu, serta calon wakil presiden, pendukung, dan masyarakat umum tanpa harus melalui proses interpretasi oleh pihak lain (Anggraheni et al, 2022).

Efek media sosial, dalam kemajuan internet, informasi dan teknologi dapat melintasi batas geografis dan dapat diakses kapan saja. Media sosial dapat meningkatkan jangkauan informasi kepada audiens. Namun, jika diseminasi ini tidak disertai dengan konten informasi yang benar tidak akan mampu menghasilkan opini publik yang objektif.

Dengan meningkatnya tingkat penetrasi internet dan pertumbuhan media baru, keberhasilan kampanye Pemilu meningkatkan jumlah aktivitas daring dan partisipasi pemilih yang menunjukkan bahwa Indonesia juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat jika dapat memanfaatkan e-demokrasi secara maksimal. Meskipun praktik e-demokrasi di Indonesia yang masih menimbulkan berbagai dilema harus segera diselesaikan.

Permasalahan yang muncul seperti e-demokrasi masih sebatas sarana atau sarana untuk mencapai tujuan penyelenggaraan negara melalui teknologi informasi dan komunikasi, sulitnya membedakan tujuan dan fasilitas, ekosistem internet yang belum bisa menjadi ruang publik, dan kesenjangan digital harus segera diselesaikan agar e-demokrasi kembali pada manfaatnya yaitu memfasilitasi berbagai aplikasi demokrasi dengan sarana elektronik yang ada (Aziz & Hasna, 2020).

E-demokrasi bukanlah *reality show* yang harus didandani agar terlihat menarik dan dramatis, melainkan upaya nyata menuju pemanfaatan TIK yang efektif dan efisien untuk kemajuan demokrasi. TIK adalah alat bukan solusi bagi demokrasi. Pelajaran utama dari negara-negara yang mampu mengadopsi prinsip-prinsip e-demokrasi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi warganya adalah persiapan yang matang sebelum diterapkan di lapangan. Persiapan tersebut meliputi identifikasi model lembaga pemerintahan, peran partai politik, posisi media massa dan sikap masyarakat terhadap perkembangan teknologi. Poin penting lainnya adalah kesinambungan dan komitmen setiap elemen aktor di negara Indonesia dengan perubahan cara pandang dalam memandang publik, pengambilan keputusan serta pembuatan saluran partisipasi (Jandevi, 2019).

Ruang virtual telah memberikan ruang kebebasan berekspresi, pengembangan keterampilan kewarganegaraan, dan mobilisasi politik. Masyarakat dapat menemukan suara mereka, dan menggunakan suara mereka melalui internet. Ke depan, cara untuk meningkatkan partisipasi politik adalah dengan melibatkan mereka melalui berbagai media interaksi, terutama dalam ruang *cyber*. Lebih penting lagi, para pengambil keputusan saat ini

harus menyadari fakta bahwa masyarakat saat ini memiliki aspirasi yang lebih besar daripada pendahulu mereka, lebih banyak informasi yang dapat dimasukkan ke dalam proses pengambilan keputusan mereka sendiri, serta keyakinan yang lebih dalam bahwa kehadiran mereka dapat membuat perbedaan dalam banyak hal (Ramli, 2012).

Misalnya penelitian yang menyimpulkan bahwa (1) Terdapat pengaruh langsung pesan politik di media online dan media sosial facebook terhadap partisipasi politik generasi milenial pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019, berpengaruh signifikan; (2) Terdapat pengaruh langsung pesan politik di media online dan media sosial terhadap kesadaran politik generasi milenial pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019, dengan berpengaruh signifikan; dan (3) Terdapat pengaruh secara tidak langsung pesan politik di media online dan media sosial facebook terhadap partisipasi politik generasi milenial pada Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 melalui kesadaran politik generasi milenial, dengan pengaruh yang signifikan (Kholisoh et al, 2019).

Perkembangan teknologi menghasilkan perubahan besar dalam pengalaman politik masyarakat. Media baru yang dirancang untuk meningkatkan jangkauan, kecepatan dan efisiensi komunikasi manusia, memiliki potensi untuk memperkuat dan meningkatkan mutu demokrasi. Media baru membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia (Alatas, 2014). Asumsinya adalah, para teoretisi demokrasi selama ini percaya bahwa demokrasi dapat terpelihara karena ada partisipasi politik warga negara yang aktif dan peduli terhadap masalah-masalah kewarganegaraan. Para Sarjana yang mempelajari partisipasi politik bahkan percaya bahwa partisipasi politik adalah inti demokrasi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh kesimpulan bahwa perkembangan teknologi informasi membawa perubahan signifikan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan partisipasi politik masyarakat. Media online sebagai media baru telah mampu menjangkau publik secara luas, potensi tersebut menyebabkan berbagai informasi telah menyebar tanpa batas. Namun, dalam partisipasi politik media *online* sudah menjadi teman akrab. Setidaknya dengan jangkauan luas dan keterbukaan media online telah ikut menyebarkan informasi, mendidik masyarakat, dan meningkatkan pengetahuan politik mereka. Hal tersebut secara bersamaan telah mempengaruhi secara signifikan terhadap partisipasi politik warga negara di Indonesia. Senada dengan itu, media online secara perlahan mulai ditertibkan untuk memberikan informasi secara valid, benar, dan terpercaya untuk memberikan pengetahuan politik dan Pemilu kepada masyarakat. Akhirnya dengan keterbukaan media online yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu secara tidak langsung ikut meningkatkan partisipasi politik masyarakat dikarenakan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara yang dinilai transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, M. (2017). "The Roles of Digital Democracy on Political Education for Young Generation" *Emerald Reach Proceedings Series*, Emerald Publishing. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-1-78756-793-1-00071/full/html>.

- Alatas, S. (2014). "Media Baru, Partisipasi Politik dan Kualitas Demokrasi", Makalah. Dipresentasikan dalam Konferensi Nasional Komunikasi 2014, Batam. [https://www.academia.edu/download/45246185/MEDIA BARU PARTISIPASI POLITIK DAN KUALI.pdf](https://www.academia.edu/download/45246185/MEDIA_BARU_PARTISIPASI_POLITIK_DAN_KUALI.pdf).
- Anderson, I., & Kuswanto, K. (2021). "The Influence of Political Awareness, Political Socialization, and Mass Media on Political Participation in Jambi Province" *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 5(2). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jssp/article/view/8742>.
- Anggraheni, P., Setyowati, N. T., Harry, H. (2022). "Social Media and Political Participation In Indonesia: Restrictions Access At Announcement Results Of 2019 Presidential Election" *Aspiration Journal: International Research of Communication*, 2(1). <http://43.229.85.142/index.php/asp/article/view/23>.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Ayed, H. A. (2005). "The Influence of Internet in Political Culture (A Field Study)" *Journal of Social Sciences*, 20(2).
- Aziz, M. S., & Hasna, S. (2020). "The Problem of E-Democracy and its Impact on Political Participation in Indonesia" *International Conference on Social and Political Sciences (ICOSAPS)*, Atlantis Press. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icosaps-20/125949686>.
- Barashkina, E., Virovtseva, E., & Maslenkova, N. (2019). "Media Text Of A City Online Newspaper: Functional Capabilities" *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, Post mass media in the modern informational society "Journalistic text in a new technological environment: achievements and problems"*.
- Chadwick, A., & Stromer-Galley, J. (2016). "Digital Media, Power, and Democracy in Parties and Election Campaigns" *The International Journal of Press/Politics*, 21(3). <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1940161216646731>.
- Dogra, N. K., & Kaur, S. (2021). "Role of Social Media in Elections and Political Participation" *IJCIRAS*, 3(8). <http://www.ijciras.com/Users/ManuScript/ManuScriptDetails/913de036-ecfe-430a-84b9-f7d96ff19efc>.
- Effendi, R., et.al. (2020). "Consumption of Online Political News and Political Participation of First-Time Voters" *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 29(1). <https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/view/19751>.
- Finnemann, N. O. (2011). "Mediatization Theory and Digital Media", *Communications*, 36(1). <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/comm.2011.004/html>.
- Hischier, R., & Reichart, I. (2003). "Multifunctional Electronic Media-Traditional Media" *International Journal of Life Cycle Assessment*. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF02978472>.
- Ida, R., Saud, M., & Mashud, M. (2020). "Persistence of social media on political activism and engagement among Indonesian & Pakistani youths" *Journal of Web-based Communities*, 22(1). <https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJWBC.2020.111361>.
- Intyaswati, D., et.al. (2021). "Social Media as an Information Source of Political Learning in Online Education", *Sage Publication*. <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/21582440211023181>.

- Jandevi, U. (2019). "New Media for Increasing Political Participation in Indonesia" *International Journal of Communication and Society*, 1(1). <https://core.ac.uk/download/pdf/230039462.pdf>.
- Kahne, J. et.al. (2010). "Digital Media Literacy Education and Online Civic and Political Participation" *DML Central Working Papers*. <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/999>.
- Kholisoh, N., et.al. (2019). "The Influence of Political Messages in New Media to Political Awareness and Its Impact on the Political Participation of Millennial Generation" *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 4(2). <http://www.jurnal-iski.or.id/index.php/jkiski/article/view/333>.
- Kuncoro, M. W. (2018). "Media Sosial, Trust, dan Partisipasi Politik Pada Pemilih Pemula" *Prosiding Seminar Nasional, Penguatan Keluarga Di Zaman Now*, Fakultas Psikologi, UNISSULA. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psnpu/article/view/4029>.
- Mudjiyanto, B. (2014). "Media Baru, Budaya Politik dan Partisipasi Politik (Survei Pemilih di Jambi, Babel dan Jakarta Mengenai Aktifitas Komunikasi Politik Melalui Media Baru)" *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 18(2). <http://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jskm/article/view/203>.
- Musfialdy, M. (2015). "Peran Media Massa Saat Pemilihan Umum Mengawasi atau Diawasi" *Jurnal RISALAH*, 26(2). https://www.researchgate.net/profile/Musfialdy-Musfialdy-2/publication/344286594_PERAN_MEDIA_MASSA_SAAAT_PEMILIHAN_UMUM_MENGAWASI_ATAU_DIAWASI_Musfialdy_1_1/links/5f63829f299bf1b53edc3344/PERA-N-MEDIA-MASSA-SAAAT-PEMILIHAN-UMUM-MENGAWASI-ATAU-DIAWASI-Musfialdy-1-1.pdf.
- Nurjulaiha, S., Suryanef, S., & Al Rafni, A. (2022). "Fenomena Politik Uang (Money Politic) pada Pemilu Menurut Perspektif Teory Political Development (Studi di Provinsi Jambi)" *Indonesian Journal of Social Science Review*, 1(2). <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/socialscience/article/view/10>.
- Ramli, R. (2012). "Youth Political Participation in Asia: Outlook in Malaysia and Indonesia", dalam *Youth Future Agents of Change or Guardians of Establishment*, Singapura: Konrad-Adenauer-Stiftung. https://www.youthpolicy.org/library/wp-content/uploads/library/2012_Youth_Agents_Change_Guardians_Establishment_Eng.pdf#page=12.
- Saud, M., et.al. (2020). "The Social Media and Digitalization of Political Participation in Youths: An Indonesian Perspective", *Society*, 8(1). <https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/view/160>.
- Zuhri, S. (2020). "Urgensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penghitungan dan Rekapitulasi Suara", *Jurnal KPU*.